



KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16/KEPMEN-KP/2015  
TENTANG  
PROGRAM LEGISLASI  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015;
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
3. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015.

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015, yang terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, dan Keputusan Menteri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Penyusunan peraturan perundang-undangan yang tidak tercantum dalam Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015, dimungkinkan penyusunannya dengan memperhatikan dasar pembentukannya dan kebutuhan hukum masyarakat.
- KETIGA : Peraturan perundang-undangan yang masuk dalam Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2014, tetapi belum dapat ditetapkan pada Tahun 2014 akan menjadi prioritas penyusunan peraturan perundang-undangan pada Tahun 2015.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Maret 2015

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



  
Hanung Cahyono

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN  
 PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 16/KEPMEN-KP/2015  
 TENTANG PROGRAM LEGISLASI  
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN  
 PERIKANAN TAHUN 2015

PROGRAM LEGISLASI  
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015

1. DITJEN PERIKANAN TANGKAP

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Undang-Undang	Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan												
2.	Peraturan Pemerintah	Kapal Perikanan												
3.	Peraturan Pemerintah	Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil												
4.	Peraturan Menteri	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia												
5.	Peraturan Menteri	Pelabuhan Perikanan yang Tidak Dibangun Pemerintah												
6.	Peraturan Menteri	Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia												

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
7.	Peraturan Menteri	Kartu Nelayan												
8.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2013 tentang Pemantau Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan												
9.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan												
10.	Keputusan Menteri	Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna Cakalang Tongkol												

## 2. DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Pemerintah	Pembudidayaan Ikan												
2.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan												
3.	Peraturan Menteri	Sistem Perbenihan Perikanan Nasional												
4.	Peraturan Menteri	Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan												
5.	Peraturan Menteri	Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik												

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
6.	Peraturan Menteri	Monitoring Residu Obat Ikan, Bahan Kimia, dan Kontaminan pada Pembudidayaan Ikan												
7.	Peraturan Menteri	Cara Pembudidayaan Ikan yang Baik												
8.	Peraturan Menteri	Pengadaan dan Peredaran Pakan Ikan												
9.	Peraturan Menteri	Pedoman Umum Budidaya Udang												
10.	Peraturan Menteri	Strategi Nasional Kesehatan Ikan dan Lingkungan												
11.	Keputusan Menteri	Potensi dan Alokasi Lahan Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia												
12.	Keputusan Menteri	Potensi dan Alokasi Induk Serta Benih Ikan Tertentu di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia												

## 3. DITJEN P2HP

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Pemerintah	Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan												
2.	Peraturan Presiden	Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan												
3.	Peraturan Menteri	Pengeluaran Mutiara Laut Selatan Indonesia ( <i>Indonesian South Sea Pearl</i> ) dari Wilayah Negara Republik Indonesia												

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
4.	Peraturan Menteri	Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan													
5.	Peraturan Menteri	Lembaga Sertifikasi Produk Hasil Perikanan													
6.	Peraturan Menteri	Tata Kelola Pemasaran Ikan Kerapu Hidup													
7.	Peraturan Menteri	Pembatasan Ekspor Ikan Cakalang Dalam Bentuk Gelondongan													
8.	Peraturan Menteri	Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Ikan Dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib													
9.	Peraturan Menteri	Skala Usaha Pengolahan													
10.	Keputusan Menteri	Pemberlakuan Penerapan Standar Nasional Indonesia 14 (empat belas) Produk Perikanan Nonkonsumsi													

## 4. DITJEN PSDKP

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Pemerintah	Pemberian Penghargaan Kepada Aparat Penegak Hukum di Bidang Perikanan dan Pihak yang Berjasa Dalam Upaya Penyelamatan Kekayaan Negara													
2.	Peraturan Pemerintah	Pengawasan Perikanan													
3.	Keputusan Presiden	Rencana Aksi Penanganan dan Penanggulangan <i>IUU Fishing</i>													

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
4.	Peraturan Menteri	Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan													
5.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan SDKP													
6.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2014 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan													
7.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan													

## 5. DITJEN KP3K

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Pemerintah	Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil													
2.	Peraturan Presiden	Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil													
3.	Peraturan Presiden	Penetapan Batas Sempadan Pantai													
4.	Peraturan Presiden	Pengalihan Saham dan Luasan Lahan Dalam Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Untuk Penanaman Modal Asing													

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
5.	Keputusan Presiden	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional BMKT												
6.	Peraturan Menteri	Tata Cara Rehabilitasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil												
7.	Peraturan Menteri	Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan												
8.	Peraturan Menteri	Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil												
9.	Peraturan Menteri	Pemanfaatan Konservasi Jenis Ikan Untuk Perdagangan												
10.	Peraturan Menteri	Tata Cara Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan												
11.	Peraturan Menteri	Perubahan Peruntukan dan Fungsi Zona Inti Pada Kawasan Konservasi												
12.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2008 tentang Akreditasi Terhadap Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil												
13.	Peraturan Menteri	Pedoman Penyusunan Rencana Zonasi Pulau-Pulau Kecil Terluar												

## 6. INSPEKTORAT JENDERAL

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Menteri	Pedoman Pelaporan dan Pengelolaan Aplikasi Pengendalian dan Pengawasan Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan												



## 7. BALITBANG KP

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Presiden	Penelitian dan Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil												
2.	Peraturan Menteri	Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan Negara Republik Indonesia												
3.	Peraturan Menteri	Tata Cara Pelepasan Ikan Hasil Rekayasa Genetik												

## 8. BPSDM KP

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Menteri	Tata Cara Penilaian, Penyajian dan Orasi Ilmiah Bagi Penyuluh Perikanan												
2.	Peraturan Menteri	Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan												
3.	Peraturan Menteri	Kurikulum Politeknik Kelautan dan Perikanan Edisi 2014												
4.	Peraturan Menteri	Tata Cara Inventarisasi Data dan Informasi Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan												
5.	Peraturan Menteri	Tata Cara Penyusunan Rencana Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan Jangka Pendek												

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
6.	Peraturan Menteri	Tata Cara Penetapan Rencana Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan												
7.	Peraturan Menteri	Standar Kurikulum Perguruan Tinggi Bidang Pendidikan												
8.	Peraturan Menteri	Sertifikasi Sumber Daya Manusia Untuk Memenuhi Kebutuhan Industri Kelautan dan Perikanan												
9.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2011 tentang Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan												
10.	Peraturan Menteri	Penilaian dan Penetapan Kelompok Perikanan Teladan/Berprestasi Nasional												
11.	Peraturan Menteri	Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan												
12.	Peraturan Menteri	Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan												

## 9. BKIPM

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Menteri	Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan Media Pembawa yang Tergolong Benda Lain Berupa Bahan Patogenik dan Bahan Biologik												
2.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan												

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
3.	Peraturan Menteri	Monitoring Hasil Perikanan												
4.	Peraturan Menteri	Pedoman Penelusuran ( <i>Traceability</i> ) pada Rantai Bisnis Perikanan												
5.	Keputusan Menteri	Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Jenis-Jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa, dan Daerah Sebarannya												
6.	Keputusan Menteri	Penetapan Area Tidak Bebas Hama dan Penyakit Ikan Karantina												

## 10. BIRO KEPEGAWAIAN

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Menteri	Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2013 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan												
2.	Peraturan Menteri	Standar Kompetensi Pegawai												
3.	Peraturan Menteri	Pola Karier PNS di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan												
4.	Peraturan Menteri	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi Melalui Seleksi Terbuka di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan												

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
5.	Peraturan Menteri	Pakaian Seragam												
6.	Peraturan Menteri	Standar Kompetensi Jabatan Fungsional PHPI												
7.	Peraturan Menteri	Pedoman Formasi Pengawas Perikanan												
8.	Peraturan Menteri	Pedoman Formasi PHPI												
9.	Peraturan Menteri	Petunjuk Teknis APHP												
10.	Peraturan Menteri	Standar Kompetensi Jabatan Fungsional APHP												
11.	Peraturan Menteri	Juknis Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan												
12.	Peraturan Menteri	Juknis Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan												
13.	Peraturan Menteri	Juknis Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan												
14.	Peraturan Menteri	Petunjuk Teknis Pengendali Hama dan Penyakit Ikan												
15.	Peraturan Menteri	Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan												
16.	Peraturan Menteri	Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan												
17.	Peraturan Menteri	Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan												

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
18.	Peraturan Menteri	Pedoman Evaluasi Penetapan dan Penilaian PAK Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan												
19.	Peraturan Menteri	Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan												
20.	Keputusan Menteri	Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/KEPMEN-KP/2013 tentang Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan												
21.	Keputusan Menteri	Rencana Kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan												

## 11. BIRO PERENCANAAN

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Menteri	Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan												
2.	Peraturan Menteri	Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 yang Dilimpahkan ke Gubernur Dalam Rangka Dekonsentrasi dan Ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tugas Pembantuan												
3.	Peraturan Menteri	Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Kelautan dan Perikanan												

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
4.	Peraturan Menteri	Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan													
5.	Peraturan Menteri	Pedoman Penetapan Target dan Realisasi Fisik Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan													
6.	Peraturan Menteri	Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kementerian Kelautan dan Perikanan													
7.	Peraturan Menteri	Pedoman Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan													
8.	Peraturan Menteri	Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan													
9.	Keputusan Menteri	Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019													
10.	Keputusan Menteri	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019													
11.	Keputusan Menteri	Rencana Kerja (RENJA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016													
12.	Keputusan Menteri	Pedoman Umum Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kementerian Kelautan dan Perikanan													
13.	Keputusan Menteri	Pedoman Penyusunan LAKIP Kementerian Kelautan dan Perikanan													

## 12. BIRO KEUANGAN

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.24/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan													
2.	Peraturan Menteri	Penatausahaan Persediaan													
3.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan													
4.	Peraturan Menteri	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan													
5.	Keputusan Menteri	Penetapan Saldo Realisasi Anggaran dan Neraca BMN Per 31 Desember 2014 ( <i>Audited</i> ) Termasuk Koreksi Pencatatan Serta Tim Perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Pertemuan Triparted													
6.	Keputusan Menteri	Pencatatan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2015 Berbasis Akrual													
7.	Keputusan Menteri	Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 Berbasis Akrual													

## 13. BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Menteri	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan												
2.	Peraturan Menteri	Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan												

## 14. PUSDATIN

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Menteri	Pedoman Umum Penyelenggaraan Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan Pusat dan Daerah												
2.	Peraturan Menteri	Master Plan Sistem Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan												
3.	Peraturan Menteri	Tata Kelola Sistem Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan												
4.	Peraturan Menteri	Petunjuk Operasional Penilaian Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan												
5.	Peraturan Menteri	Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan												



## 15. PUSKITA

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Pedoman Kerja Sama Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan													
2.	Peraturan Menteri	Peran Serta Masyarakat Dalam Pola Kemitraan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan													
3.	Peraturan Menteri	Tata Cara Penugasan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan di Lembaga Internasional di Dalam dan Luar Negeri													
4.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2012 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan													

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono